

## Warga Sleman Diingatkan Pilih Pemimpin Teladan, Bukan Titipan



Mbah Bardi saat temu warga Depok dan Berbah.

KR-Istimewa

**SLEMAN (KR)** - Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengimbau warga Sleman agar tidak salah pilih pemimpin pada Pilkada Kabupaten Sleman, 9 Desember mendatang. Warga harus memperhatikan aspek teladan, kemampuan dan pengalaman. Bukan pemimpin titipan yang tiba-tiba muncul menjelang pemilihan.

"Kalau salah pilih, konsekuensinya berat. Kerja-kerja pemerintahan dan pembangunan akan merosot," ungkap Subardi saat bertemu dengan warga dari Kapanewon Berbah dan Depok, di kawasan Prambanan, Selasa (17/11).

Menurutnya, sistem otonomi memberi kebebasan kepada daerah untuk maju. Sistem ini juga membuat pola pembangunan daerah bergantung pada pemimpin. "Saya mengimbau jangan pilih pemimpin yang modal titipan, tanpa kemampuan, apalagi tak punya pengalaman," tandas Mbah Bardi, sapaan akrabnya.

Pemimpin titipan, lanjut Mbah Bardi, akan

didukung oleh jaringan kekuasaan. Kekuatan uang akan memuluskan ambisi meraih kekuasaan, mulai dari pencalonan hingga pemilihan. "Biasanya calon pemimpin titipan akan mengadakan politik uang. Mereka di-backup oleh jaringan kekuasaan, apalagi jaringan itu ada hubungan kekeluargaan. Ini berbahaya, saya harap masyarakat sadar, jangan diabaikan demi masa depan Sleman," tegas Ketua DPW NasDem DIY ini.

Dalam kesempatan ini mbah Bardi mengingatkan pentingnya menilai pemimpin dari aspek teladan dan gagasan, bukan pencitraan yang berlebihan. Ia pun menyarankan agar warga menyaksikan tayangan ulang debat antar paslon yang diselenggarakan KPU. "Untuk menilai paslon yang teladan dan titipan, itu jelas tersaji waktu debat kemarin. Silakan dinilai siapa yang gagap, dan siapa yang siap," terangnya.

Politikus berusia 68 tahun itu lantas menggam-

barkan sosok pemimpin teladan adalah Sri Muslimatun. Kandidat nomor urut 2 ini dinilai sebagai sosok teladan yang baik. Dari aspek personal, Muslimatun tidak pernah bermasalah. Sementara dari aspek kemampuan, wakil bupati sejak tahun 2015 ini mampu menekan angka kemiskinan lewat program-program pemberdayaan.

Subardi pun menggambarkan kesuksesan Muslimatun dalam berkarir, mulai dari seorang bidan hingga menjadi wakil bupati. "Bu Muslimatun ini berjuang sendiri, bukan dari keluarga pejabat atau konglomerat. Bu Mus merintis karir mulai dari seorang bidan hingga sekarang punya RS sendiri. Warga-warga yang tidak mampu dibantu, mau lahiran atau berobat, juga dibantu. Semua tahu bu Mus sering membantu urusan kemanusiaan. Ini yang saya maksud teladan. Sekali lagi saya mengimbau, jangan coba-coba memilih pemimpin. Jangan taruhkan masa depan Sleman," pungkasnya. (Has)-f

## Penanganan Covid-19 Butuh Roadmap

**SLEMAN (KR)** - Penanganan pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman memerlukan peta jalan (roadmap) yang jelas, mulai tanggap darurat, tahap pemulihan ekonomi dan tahap kebangkitan ekonomi. Roadmap yang jelas disertai garis waktu (timeline) akan memudahkan banyak pihak melakukan koordinasi dan bersinergi sehingga penanganan pandemi Covid-19 menjadi optimal.

Demikian dikatakan Anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Kabupaten Sleman, Hembri Suyatna dalam Focus Group Discussion (FGD) Forpi Sleman bertema 'Sleman Bangkit dari Pandemi Wabah Covid-19' di RM Kopi Njongke Sendangdi Mlati Sleman, Selasa (17/11).

FGD menghadirkan narasumber Kabid Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan Bappeda Sleman Erny Maryatun, Sekretaris BPBD Sleman Asih Kushartati, Anggota Forpi Sleman Agus Nugroho dipandu moderator Koordinator Forpi Sleman sekaligus Pemimpin Redaksi SKH Kedaulatan Rakyat (KR) Octo Lampito. Hadir pula dalam FGD Kepala Dinas Sosial Sleman Eko Suhargono, Kepala Dinas Pendidikan Sleman Ery Widaryana, Direktur RSUD Sleman Cahya Purnama dan Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Sleman Dul Zaini.

Hembri mencatat perlu adanya database yang terpadu mengenai bantuan sosial (bansos) dari berbagai sumber untuk meminimalkan salah sasaran. Di sektor pariwisata perlu optimalisasi dan standarisasi penerapan protokol kesehatan diberbagai destinasi wisata, hotel, pasar dan sentra UMKM. (Dev)-f

## Ratusan APK Diturunkan Bawaslu dan Satpol PP

**SLEMAN (KR)** - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sleman bersama Satuan Polisi Pamong Praja menertibkan ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kapanewon Godean. Upaya penertiban ini akan dilakukan secara bertahap hingga pekan depan. Mayoritas APK yang ditertibkan karena kesalahan pada cara pemasangan, berada di lokasi yang dilarang hingga APK tak berizin.

Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sleman Sutoto Jatmiko mengatakan, penertiban APK dimulai dari Jalan Godean hingga perbatasan Kulonprogo. Setelah penertiban tahap 1, akan dilanjutkan dengan penertiban berikutnya hingga dua minggu kedepan. Dalam penertiban kali ini, APK yang ditertibkan terdiri dari baliho 30, rontek atau banner sebanyak 294,

spanduk sebanyak 8. "Total keseluruhan ada 332 APK yang ditertibkan," ujarnya kepada KR, Selasa (17/11).

Menurut Sutoto, Bawaslu Sleman sudah mengantongi data jumlah APK yang melakukan pelanggaran. Misalnya APK yang melanggar cara pemasangannya sebanyak 3.040, dipasang di tempat yang salah sebanyak 371, pelanggaran konten 40 dan tanpa izin 1. "Satpol PP

menertibkan di jalan provinsi dan jalan nasional. Sedangkan jalan-jalan yang masuk ke desa diharapkan bisa ditertibkan oleh jajaran Trantib Kapanewon yang bisa melibatkan linmas setempat," ungkapnya.

Plt Kepala Satpol PP Sleman Susmiarto menambahkan, dalam penertiban APK ini Satpol PP hanya berperan membantu Bawaslu Sleman. "Kami nenerjukkan 50 personel dibagi 2 tim. Termasuk 10 linmas dan didukung Denpom, Kodim, Polres, Kesbangpol. Pada prinsipnya kami siap jika diminta bantuan oleh Bawaslu Sleman karena diamanatkan dalam peraturan Bupati," bebernya.

Penertiban APK selanjutnya dilakukan pada Rabu (18/11) di Jalan Raya Wates

atau batas Kabupaten Bantul, Kamis (19/11) di Jalan Raya Magelang atau sampai batas kota Yogya dan batas kota Magelang. Kemudian di Senin (23/11) di Jalan Raya Tentara Pelajar sampai Jalan Monjali atau batas Kota Yogya sampai Pasar Pakem, Selasa (24/11) di Jalan Raya Kaliurang atau batas kota

Yogya atau sampai Tlogoputri Pakem, Rabu (25/11) di Jalan Raya Solo atau batas kota Yogya sampai Prambanan. Terakhir Kamis (26/11) di Jalan Raya Cangkringan atau kantor Kapanewon Pakem sampai Kantor Kapanewon Cangkringan dan Jalan Raya Gedongan. (Aha)-f



Petugas gabungan menertibkan sejumlah APK di wilayah Godean.

KR-Istimewa

## Perempuan Kusuma NoTo Sosialisasi Pilkada



KR-Rahajeng Pramesi

**Pemberian souvenir simbolis dari Ketua Pembina PKNT kepada Paguyuban Pendapa Daru Asih.**

**BANTUL (KR)** - Perempuan Kusuma NoTo (Drs H Suharsono-Drs Totok Sudarto MPd) melakukan sosialisasi Pilkada 9 Desember 2020. Kali ini sosialisasi dilakukan kepada komunitas Paguyuban Pendapa Daru Asih yang terdiri dari perias, pengusaha catering, salon dan sebagainya.

"Ini pertamakalinya komunitas Paguyuban Pendapa

Daru Asih bertemu dengan kami. Kedatangan kami untuk mensosialisasikan jargon sampai warga masyarakat lupa kalau 9 Desember mendatang ada Pilkada. Jangan sampai ada warga Bantul yang golput," ujar Ketua Pembina PKNT, Hj Erna Suharsono, Selasa (17/11).

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Pengurus DPD Golkar Bantul

Widodo Amd yang merupakan salah satu parpol pendukung paslon NoTo.

Ketua 2 Paguyuban Pendapa Daru Asih, Sulistianingsih menyatakan anggotanya sebanyak 50 orang. Paguyuban Pendapa sudah berumur 10 tahun dan tetap terus ada bagi kemajuan usaha kecil di Bantul.

"Kami berharap NoTo mampu menjajarkannya utamanya pelaku UKM dan pengusaha lemah. Selain itu kami berharap program pro perempuan dan anak terus digalakkan pada pemerintahan NoTo mendatang," tegasnya.

Banyak harapan yang disampaikan warga pada paslon NoTo di antaranya yakni keberhasilan pembangunan yang terus berlanjut dan bermanfaat bagi warga Bantul. (Aje)-f

## DINILAI WAJAR DAN DITERIMA SEMUA PIHAK

## Bantul Usulkan UMK 2021 Rp 1.842.454

**BANTUL (KR)** - Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul mengusulkan besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bantul 2021 sebesar Rp 1.842.454 atau naik 2,9 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.790.500. Hal tersebut dikemukakan Sekda Bantul, Drs H Helmi Jamharis MM, Selasa (17/11).

"Usulan tersebut sudah kami sampaikan kepada Pjs Bupati Bantul untuk diusulkan kepada Gubernur DIY. Apabila disetujui akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021," ungkap Helmi. Usulan tersebut sudah digodog Dewan Pengupahan yang terdiri dari Apindo, Serikat

Pekerja (SP), perwakilan pemerintah maupun akademisi dengan berbagi pertimbangan.

Sementara Wakil Ketua Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun) PT Madubaru Bantul, Suhadi ST, mengemukakan sebenarnya usulan angka UMK 2021 tersebut masih kecil, jika dibanding dengan kondisi ekonomi atau harga kebutuhan hidup saat ini. "Tapi apabila dibanding dengan angka-angka dasar perhitungan penentu UMK, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terdampak Covid-19, kami bisa menerima usulan sebesar itu," ungkap Suhadi.

Diharapkan, usulan UMK 2021 ada

kenaikan 2,9 persen tersebut dapat berdampak positif terhadap anggota pekerja di Bantul. Termasuk pekerja di PG-PS Madukismo yang jumlahnya tidak kurang dari 4.800 orang dan ekonominya juga sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Terpisah Ketua Kadinda Bantul, Ibnu Kadarmanto MT usai audiensi dengan Pjs Bupati Bantul mengatakan, walaupun pihaknya tidak masuk dalam Dewan Pengupahan, tapi usulan itu dinilai wajar mengingat saat ini kondisi perusahaan pada umumnya dalam kondisi prihatin, karena dampak pandemi Covid-19. (Jdm)-f

## Kapanewon Depok Dilengkapi Gedung Sasana Kapti

**SLEMAN (KR)** - Kapanewon Depok memiliki Gedung Sasana Kapti yang difungsikan sebagai gedung showroom bagi produk UKM di wilayah Kapanewon Depok. Gedung itu sekaligus menjadi Sekretariat bersama bagi relawan (PMI, Kwartir Ranting Pramu dan Radio Antar Penduduk Indonesia) yang berada di Kapanewon Depok.

Peresmian Gedung Sasana Kapti dilakukan Bupati Sleman Sri Purnomo, Selasa (17/11) ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh bupati di Pendapa Kantor Kapanewon Depok.

"Gedung Sasana Kapti yang menjadi showroom ini menjadi wujud nyata dukungan promosi dan penjualan produk-produk karya UKM serta mengkomodir potensi dan produk unggulan dari Kelompok Wanita Tani se Kapanewon Depok," ujarnya.

Sementara Panewu Depok Abu Bakar menjelaskan, gedung tersebut dibangun sejak tahun 2019 sebagai upaya mewujudkan Kapanewon Depok sebagai pusat pelayanan. "Peresmian Gedung Sasana Kapti ini juga dimeriahkan dengan festival angkringan



Bupati dan Panewu Depok meninjau showroom UMKM di gedung yang baru.

KR-Istimewa

yang melibatkan puluhan pedagang angkringan di wilayah Kapanewon Depok. Puluhan angkringan tersebut juga dilombakan baik dari rasa maupun penampilannya," kata Abu Bakar. (Has)-f

## JADI LEMBAGA PENDIDIKAN ADAPTIF MTsN 8 Bantul Beri Layanan Cepat

**BANTUL (KR)** - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama DIY, Drs Edhi Gunawan MPdI mengadakan monitoring dan evaluasi sarana prasarana (Money Sarpras) di MTsN 8 Bantul. Kunjungan tersebut dalam rangka peningkatan mutu madrasah.

Kakanwil Kemenag DIY bakal mengusahakan rehabilitasi ruang guru dan Lab IPA yang rusak sehingga perlu rehab. Kunjungan tersebut juga dimanfaatkan untuk membuka website MTsN 8 Bantul. "Alhamdulillah MTsN 8 Bantul sudah men-

jadi lembaga Pendidikan Adaptif, mampu memberikan layanan yang cepat kepada masyarakat. Informasi yang terkait madrasah dapat dilihat melalui website MTsN 8 Bantul," ujarnya.

Kepala TU MTsN 8 Bantul, Atho Assalami, Selasa (17/11), mengatakan kunjungan tersebut sangat berarti bagi perkembangan madrasah. "Kami berterima kasih atas kunjungan Kakanwil Kemenag DIY dan juga telah membuka website MTsN 8 Bantul www.mtsn8bantul.net," jelasnya. (Roy)-f

## Pendidikan Indonesia Tertinggal 50 Tahun

**BANTUL (KR)** - Survei Program International Student Assessment (PISA) tahun 2019 menunjukkan kemampuan penguasaan literasi, berpikir analitis dan kemampuan memecahkan persoalan siswa Indonesia masih di bawah 19 poin dari perkiraan bank dunia. Bahkan kualitas pendidikan Indonesia tertinggal 50 tahun dibanding rerata negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Demikian dikatakan Pendiri Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) Muhammad Nur Rizal PhD dalam Workshop 'Penguatan Ekosistem Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Melalui Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) di Hotel Grand Dafam Rohan, Banguntapan Bantul, Senin

(17/11). Workshop diselenggarakan Dirjend Pendidikan Vokasi Kemdikbud menggandeng GSM diikuti para Kelapa SMK yang terpilih dalam program Kepsek CEO.

Menurut Nur Rizal, perlu perubahan arah kebijakan politik pendidikan dan narasi bersama antara pemerintah pusat dan daerah untuk bergerak bersama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di bidang pendidikan ini. Indonesia kini harus bekerja secara berbeda. GSM memandang, pendekatan pemenuhan administrasi itu harus diubah secara fundamental.

"Fokus Kemdikbud dan pemerintah daerah lebih pada aspek terukur dan teramati dari pembelajaran," jelasnya. (Dev)-f

## Akhir November, Perbaikan Jalur Evakuasi Selesai

**SLEMAN (KR)** - Perbaikan jalur evakuasi di Srunen-Singlar dan Watuadeg-Plosokerep ditargetkan akhir November 2020 selesai. Diharapkan jika sewaktu-waktu masyarakat diminta evakuasi, jalur tersebut sudah dapat dilalui.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman Taufiq Wahyudi ST MTP mengatakan, dalam status tanggap darurat Gunung Merapi, pihaknya melakukan perbaikan jalur evakuasi di dua jalur yakni Srunen-Singlar dan Watuadeg-Plosokerep. Perbaikan jalur evakuasi itu menggunakan bantuan tak terduga. "Kedua jalur evakuasi itu kondisinya memang cukup rusak berat," ujarnya, Selasa (17/11).

Untuk perbaikan jalur evakuasi di Srunen-Singlar sudah memasuki tahap penyempurnaan. Sedangkan untuk jalur di Watuadeg-Plosokerep baru saja dimulai. Perbaikan kedua jalur itu ditargetkan 30 November 2020 sudah selesai semua. "Akhir bulan ini kemungkinan sudah selesai karena sesuai masa tanggap darurat yang berakhir 30 November nanti. Perbaikan ini hanya bersifat darurat saja," tuturnya.

Dengan perbaikan jalur evakuasi ini, diharapkan jika sewaktu-waktu status Gunung Merapi naik dan masyarakat diminta mengungsi, proses evakuasi bisa jalan. Mengingat jalan ini sangat penting dalam kelancaran proses evakuasi.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Sleman masih terus menambah penerangan di jalur evakuasi. Selain di jalan-jalan yang termasuk daerah bahaya sesuai rekomendasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), Dishub Sleman juga menambah penerangan di wilayah Turi dan Pakem.

Plt Dinas Perhubungan Sleman Arip Pramana mengaku terus melengkapi jalur evakuasi untukantisipasi jika terjadi erupsi di malam hari. Baru-baru ini Dishub Sleman juga sudah menambah lampu penerangan jalan di Umbulharjo, Girikerto dan Purwobinangun. "Pemasangan lampu jalan seperti di Umbulharjo dan Glagaharjo juga sudah selesai," katanya. (Sni/Aha)-f